

PEMBERDAYAAN PERANGKAT PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN (Studi Di Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur)

*Aristo Zulhadji¹
Sarah Sambiran²
Franky Rengkung³*

Abstrak

Pedesaan sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam konteks pembangunan yang merupakan suatu kebijaksanaan nasional yang didasarkan pada beberapa alasan mendasar, Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan tentu membutuhkan pegawai aparat maupun perangkat yang handal dalam pelayanan dan pembangunan yang prima. Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur merupakan salah satu diantara 4 desa yang ada di Kecamatan Kotamobagu Timur, Sebelah Utara yang berbatasan dengan Desa Upai Kecamatan Kotamobagu Utara, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Moyag Todulan, disebelah timur berbatasan dengan kawasan Gunung Ambang Kecamatan Kotamobagu Timur, dan Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur. Untuk meningkatkan sumber daya perangkat di desa perlu dilakukan pemberdayaan seperti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Perangkat Desa. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kecamatan Kotamobagu Timur pada bulan Januari, dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah yaitu, Kepala Desa Moyag, Sekretaris Desa Moyag, Kaur Pemerintahan Desa Moyag, Ketua Tim PKK Desa Moyag dan Masyarakat Desa 1 Orang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pembahasan teori metode pemberdayaan perangkat desa di kantor Desa Moyag sudah diterapkannya metode Pemberdayaan seperti Pendidikan dan latihan tetapi masih belum adanya tingkat kedisiplinan, tingkat kesadaran, pelibatan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perangkat Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kawasan pedesaan sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam konteks pembangunan nasional yang merupakan suatu kebijaksanaan nasional yang didasarkan pada beberapa alasan mendasar, antara lain : Pertama, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan; Kedua, bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang hasil-hasilnya langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat banyak; Ketiga, bahwa pembangunan desa mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Sementara itu, diketahui bahwa kondisi masyarakat pedesaan dewasa ini menghadapi berbagai persoalan, yang pada umumnya bertumpu pada beberapa permasalahan pokok yang sangat menonjol dan mewarnai perkembangan serta pertumbuhan kawasan pedesaan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, yaitu: (1) Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat maupun perangkat pemerintah desa; (2) Lemahnya peranan administratif pemerintah desa (administrative roles); (3) Lemahnya peranan kelembagaan desa dan lain-lain yang pada gilirannya menghambat percepatan keberhasilan pembangunan desa menuju tingkat kemandiriannya. Oleh karena itu, upaya untuk perangkat pemerintah desa merupakan suatu hal yang “mau tidak mau” atau mutlak harus dilakukan oleh instansi terkait, di mana pemberdayaan itu sendiri mengandung makna suatu upaya untuk membangun daya dalam diri manusia, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan berarti memberikan rangsangan-rangsangan/motivasi-motivasi tertentu berupa pemberian kesadaran akan hak dan kewajiban melalui kegiatan pembinaan, pemberian pengetahuan/ketrampilan melalui kegiatan Pelatihan, pemberian, tanggung jawab melalui penndelegasian wewenang, pemberian aksesibilitas melalui penyediaan sarana, peralatan dan fasilitas kerja, dan lain-lain yang pada gilirannya akan mendorong aparat pemerintah desa untuk bekerja secara efektif guna mempercepat keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.

Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur sebagai lokasi penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan di atas. Dari data awal yang dimiliki menunjukkan bahwa walaupun wilayah ini yang masyarakatnya termasuk aparat pemerintah desa mempunyai kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai, namun dalam hal percepatan keberhasilan pembangunan desa, ternyata masih ada hambatan yang disinyalir mempunyai kondisi ekonomi/taraf hidup yang belum memadai, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah serta masih jauh dari tingkat kemandirian masyarakatnya. Kondisi di atas tentunya disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya belum maksimalnya upaya pemberdayaan perangkat pemerintah desa yang ada, di mana frekuensi kegiatan pembinaan dan pelatihan masih rendah, tingkat kepercayaan pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa dalam hal penndelegasian wewenang belum optimal dilakukan serta ketersediaan sarana, peralatan dan fasilitas kerja belum memadai.

Tinjauan Pustaka **Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan”. Oleh karena itu, mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi, dan memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu rambu nilai/norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Manfaat pemberdayaan Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merriam Webster dalam (Risanti Riza dan H. Roesmidi 2006:43) mengandung dua pengertian :

a. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai member

kecakapan/kemampuan atau memungkinkan

b. To give power of authority to, yang berarti memberi kekuasaan.

Mardikanto dan Soebianto (2012:29) mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa semua manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran ; kedua, memperkuat potensi atau daya yang salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan taraf pendidikan, pembukaan akses terhadap modal, teknologi dan informasi; dan ketiga, memberdayakan juga berarti melindungi.

Menurut Suharto Edi (dalam Mardikanto. T dan Soebianto.P. 2012) Memberdayakan masyarakat, menuntut beberapa prasyarat atau kondisi : Ada lima prasyarat yang diperlukan, yaitu 1). adanya kondisi pemberdayaan, 2). memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya, 3). perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang, 4). meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan 5) fungsi pemerintah.

1. Menciptakan Kondisi Pemberdayaan

Kondisi pemberdayaan masyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu

masyarakat madani (civil society). Suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setiap anggota masyarakat dari masyarakat madani tersebut adalah masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan juga tahu akan kewajibannya. Masyarakat yang hanya mengetahui akan hak-hak dasarnya, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat merupakan suatu contradiction in terminis. Anggota masyarakat yang tidak mengetahui kewajibannya adalah anggota masyarakat yang menginginkan adanya paksaan dari luar atau dari atas. Sebab bagaimanapun juga suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang teratur, yang terus-menerus berubah dan membangun demi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat itu. Oleh sebab itu, di dalam suatu masyarakat madani (civil society), hak asasi manusia (HAM) merupakan inti dari kehidupan bersama. Dalam arti bahwa di dalam HAM implisit kewajiban setiap anggotanya untuk memajukan kesejahteraan sendirinya, tetapi dibina secara bertahap, tentunya pada tahap permulaan atas bimbingan pemerintah dan secara perlahan-lahan ditangani oleh anggota masyarakatnya sendiri.

2. Kesempatan Agar Semakin Berdaya

Kondisi pemberdayaan yang telah dijelaskan hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya memperoleh kesempatan agar semakin berdaya. Terdapat berbagai bentuk kesempatan bagi pengembangan pemberdayaan tersebut. Dewasa ini telah tumbuh sekian banyak lembaga swadaya masyarakat sebelumnya disebut non-governmental organization=NGO atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP).

Menjamurnya LSM-LSM di seluruh dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dunia dan pemerintah Negara-negara dewasa ini memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi masyarakat.

3. Perlindungan Agar Berdaya

Di dalam suatu masyarakat atau Negara yang sedang berkembang perlindungan terhadap pemberdayaan masyarakat terutama pada tahap-tahap permulaan perlu dilakukan. Sebagai contoh ialah perlindungan terhadap yang lemah menghadapi organisasi masyarakat yang telah mapan. Di dalam bidang ekonomi, yang kuat haruslah membimbing yang lebih dan bukan mengeksploitatif yang lemah. Program-program untuk penanggulangan kemiskinan perlu dipacu dan dipercepat agar seluruh potensi masyarakat dapat ditingkatkan untuk bersama-sama bersaing di dalam era keterbukaan saat ini. Perlindungan terhadap ketidakberdayaan ini sudah tentu semakin lama semakin ditiadakan agar kemandirian penuh setiap anggota masyarakat Indonesia dapat diwujudkan sebelum kita dapat bersaing sepenuhnya di dalam pasar bebas.

4. Kemampuan Agar Semakin Berdaya

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah pemberdayaan setiap anggota masyarakat itu serta lembaga-lembaga masyarakat yang menampung produktivitas dari para anggotanya. Oleh sebab itu, kedua program penting tersebut perlu disusun. Program-program itu antara lain peningkatan kemampuan para anggota masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka mampu dan semakin berdaya untuk menggarap potensi dan kesempatan yang akan muncul di dalam proses industrialisasi dan pasar bebas

yang akan datang. Tanpa penguasaan keterampilan yang distandardisasi baik domestik maupun regional bahkan internasional, maka kualitas sumber daya kita bukan akan semakin berdaya, tetapi akan semakin tidak berdaya karena dilanda oleh kualitas sumber daya manusia yang lebih berdaya di pasar bebas.

5. Fungsi Pemerintah

Tumbuhnya suatu masyarakat dan partisipasi anggotanya tumbuh dengan marak, tentunya memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang kondusif untuk itu. Fungsi pemerintah di dalam masyarakat adalah ibarat memegang stir perahu dan bukan sebagai pendayung. Saat ini kita lihat masih dominannya peranan pemerintah di dalam pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang.

Konsep Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Dusun/Dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Perangkat Desa menurut HAW. Widjaja (2003:3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (Dalam Mardikanto dan Soebianto 2012 : 10) dibagi kedalam beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pembangunan ;
2. Pertumbuhan dan Distribusi;
3. Teknologi Tepat Guna;
4. Kebutuhan Dasar;
5. Pembangunan Berkelanjutan;
6. Pemberdayaan.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya,

dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Metode Penelitian

Bodgan dan Taylor (Basrowi, 2013; 21) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada hakikatnya

adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam skala kecil, terhadap sekelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi atau biasa juga bermasalah (sukmadinata. 2005:98). Merujuk pada pemahaman tersebut, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perangkat pemerintahan desa yang ada di Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam meningkatkan pembangunan didesa. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah desa moyag dan penghambat pemberdayaan perangkat pemerintah desa Moyag di kecamatan Kotamobagu Timur. Objek dalam penelitian ini adalah Perangkat Pemerintah Desa Moyag di Kecamatan Kotamobagu Timur. Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi Informan kunci adalah :

1. Rusmin Mamonto (Sangadi Desa Moyag)
2. Maskur Gumalangit (Sekertaris Desa Moyag)
3. Masri Mamonto (Kaur Pemerintahan Desa Moyag)
4. Randa Mamangkay (Masyarakat)
5. Masni Mamonto (Ketua Tim PKK Desa Moyag)

Hasil Penelitian

Seperti yang diungkapkan Rahim (dalam Mardikanto, T dan Soebianto, P. 2012) bahwa, di dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat dua kelompok atau "sub-sistem" pelaku - pelaku pembangunan, yang terdiri

atas: (1) Sekelompok kecil warga masyarakat yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah, disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal; (2) Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll.), pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana utama kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini; sedang kelompok "elit masyarakat" hanya berfungsi sebagai penerjemah "kebijakan dan perencanaan pembangunan" sekaligus mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Yang dimaksudkan dengan sub-sistem "pemerintah dan penggerak" adalah: semua aparat pemerintahan, penyuluh (change agent), pekerja-sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivitas LSM/LPSM yang terlibat dan berkewajiban untuk :

a) Bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan

legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan;

- b) Menginformasikan dan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat;
- c) Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat;
- d) Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan;
- e) Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang terlibat langsung sebagai pelaksanaan dan atau dijadikan sasaran utama pembangunan secara adil.

Sedang yang dimaksudkan dengan sub-sistem masyarakat atau pengikut, adalah : sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem "pemerintah/penggerak" di atas, yang berkewajiban untuk :

- a) Menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya yang sah dalam suatu forum yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut;
- b) Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan fungsi dan pengorbanan yang telah diberikan;

- c) Memberikan masukan atau umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;
- d) Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan dengan itu, demi keberhasilan pembangunan kedua kelompok pelaku-pelaku pembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab, sehingga dapat terjalin komunikasi atau berinteraksi secara efektif. Di samping itu, antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam setiap kelompoknya masing-masing juga perlu melakukan hal yang sama.

Terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan pemerintah Desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur memprogramkan pembangunan balai pelatihan dan pendidikan yang akan dipakai sebagai salah satu sarana melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk pengerjaannya dilakukan sepenuhnya oleh warga masyarakat Desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat pemerintahan Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dilakukan oleh kepala desa bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Hal itu diungkapkan oleh Baharudin (Kepala Desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur) ketika dikonfirmasi oleh peneliti. Menurutnya: “ketika saya melihat kemampuan perangkat pemerintahan yang saya pimpin memiliki masalah terkait dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka saya menyusun program untuk melakukan pelatihan kepada mereka. Itu saya lakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Disamping itu mereka saya ikut sertakan di berbagai kegiatan pelatihan

yang diadakan oleh pemerintah baik ditingkat kecamatan hingga di tingkat provinsi. Selain itu juga kami memprogramkan pembangunan gedung yang bisa dipakai untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Hal itu saya lakukan agar masyarakat desa bisa mendapatkan penghasilan dari situ.”

Hal itu diakui oleh Maskur Gumalangit (sekertaris desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur). “memang saya dengan beberapa rekan perangkat desa beberapa kali mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kota untuk peningkatan kemampuan kami dalam menjalankan tugas kami”. Dari hasil penelitian program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur adalah dengan melakukan pelibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Namun dari sisi perencanaan peneliti menemukan pelibatan masyarakat masih sangat kurang. Semua program pembangunan hanya ditentukan oleh kepala desa sendiri, tanpa melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat. Padahal pelibatan masyarakat merupakan salah satu persyaratan penting dalam upaya pemberdayaan.

Hal itu tidak dilakukan berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa saat dikonfirmasi karena masyarakat dianggap belum memiliki kemampuan untuk itu. Oleh sebab itu berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi perangkat pemerintah desa dan berbagai lembaga yang ada terus dilakukan oleh kepala desa.

Salah satu syarat pemberdayaan masyarakat adalah selain melakukan peningkatan kemampuan dari sumber daya manusianya juga perlu dilakukan

peningkatan kemampuan dari berbagai lembaga yang ada di desa. Oleh sebab itu disamping pelatihan kepada perangkat pemerintah desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, berbagai program pembinaan kepada berbagai lembaga adat, organisasi pemuda, tenaga Siskamling maupun PKK juga dilakukan. Berbagai program dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota. Bahkan ada juga yang dilakukan dengan berkerjasama dengan perguruan tinggi. Hal itu diakui oleh berbagai pihak terkait ketika dikonfirmasi oleh peneliti. Seperti yang diungkapkan oleh Masri Mamonto (Kaur. Pemerintahan) ketika dikonfirmasi: “Waktu itu kami pernah di suruh oleh kepala desa untuk mengikuti program pembinaan lembaga dan organisasi ditingkat desa yang diadakan oleh pemerintah kota. Disitu kami dilatih untuk menyusun program pemberdayaan dan mekanisme implementasinya. Kegiatan tersebut memang sangat berguna bagi kami”.

Hal yang sama diungkapkan oleh ketua tim penggerak PKK desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur: “memang kami pernah mengikuti program pelatihan menjahit dan merangkai bunga yang diadakan oleh pemerintah kota. Dalam kegiatan tersebut kami dilatih untuk bagaimana PKK di desa kami bisa melakukan kegiatan hasil pelatihan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu di desa kami”. Sedangkan dari generasi muda juga mengakui ada beberapa kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan generasi muda. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan

adalah dengan mengadakan pelatihan las bagi para pemuda anggota karang taruna yang ada di desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur. Bahkan menurut seorang informan Randa Mamangkay (Masyarakat) ketika dikonfirmasi hasil dari pelatihan tersebut sudah ada pemuda yang membuka usaha las sendiri di rumahnya.

Dari hasil pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memang pemerintah desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur telah melakukan berbagai program dalam kaitannya dengan pemberdayaan guna mempercepat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur. Namun dari hasil penelitian juga ditemui bahwasanya berbagai program yang telah dilakukan belum dapat dikatakan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu terlihat dari masih ada beberapa perangkat desa yang belum memahami apa yang menjadi Tupoksinya. Selain itu juga dari beberapa program pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator masyarakat yang berdaya ternyata masih sangat minim.

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, diakui oleh kepala desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, masih belum dapat meningkatkan kemampuan dari perangkat yang dipimpinya. Sehingga beberapa program pembangunan yang sudah direncanakan belum dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kendala yang

ditemui, menurut kepala desa ketika dikonfirmasi, adalah: “kenapa berbagai program yang sudah saya lakukan masih belum dapat meningkatkan kinerja dari perangkat pemerintahan desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, adalah karena disebabkan sumber daya perangkat pemerintah yang ada memang masih rendah. Selain itu juga masalah disiplin masih menjadi kendala utama. Sehingga tupoksi yang menjadi tanggung jawab mereka masih sulit diwujudkan sesuai dengan yang seharusnya. Untuk itu berbagai upaya pembinaan akan terus saya lakukan dengan harapan mereka dapat mengerti apa yang menjadi tupoksi mereka. Selain itu juga kondisi perekonomian masyarakat di Desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, masih terkategori miskin, dan masih banyak warga yang tingkat pendidikannya rendah.”

Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur, untuk memberdayakan perangkat pemerintahan desa serta berbagai lembaga dan organisasi di tingkat desa sudah cukup baik, namun dari sisi pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang.
2. Berbagai kendala yang menghambat pemberdayaan perangkat pemerintah desa, lembaga - lembaga dan organisasi di desa Moyag kecamatan Kotamobagu Timur banyak lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusianya.

Saran

Dalam hal ini pemerintah desa diharapkan kepala desa untuk selalu mengikut sertakan perangkat

pemerintah desa dalam hal pendidikan dan pelatihan (Diklat) apa saja yang dapat menambah sumber daya perangkatnya agar perangkat paham dengan tupoksinya, dengan peningkatan kinerja tersebut maka diharapkan perangkat bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mampu menjabarkan program-program pembangunan di desa kepada masyarakat agar masyarakat desa bisa paham dengan baik program pembangunan desa serta bisa terlibat secara efektif dalam pembangunan di desa Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit. PT Refika Aditama.
- Abdul R.Salim dan Hermansyah. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Bustang. 2008. *Potensi Masyarakat Dan Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin Pedesaan Di Kabupaten Bone*, Tesis: Institut Pertanian Bogor.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-3*.Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kartasmita. 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan*

- Pertumbuhan Dan Pemerataan.*
Jakarta: CIDESINDO
- Mardikanto. T dan Soebianto.P. 2012.
*Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Perspektif Kebijakan Publik.*
Bandung: Alfabeta.
- Moehariono. 2010. *Pengukuran kinerja
Berbasis Kompetensi.* Bogor: Ghalia
Indonesia
- Nasution. 2003. *Metode Research:
Penelitian Ilmiah.* Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
- Risyanti Riza dan Roesmidi, M.M.
2006. *Pemberdayaan Masyarakat.*
Sumedang: ALQAPRINT
JATINANGOR.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi
Bratakusumah. 2005. *Perencanaan
Pembangunan Daerah.* Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian P. Sondang. 2008. *Administrasi
Pembangunan, Konsep, Dimensi dan
Strateginya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan
Pengembangan Kompetensi SDM
(Teori, Dimensi Pengukuran dan
Implementasi dalam Organisasi).*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. 2009. *Membangun
Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*
Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-
Model Pemberdayaan.* Yogyakarta:
Graha Ilmu.
- Syaodih Sukmadinata. 2005. *Landasan
Psikologi Proses Pendidikan.*
Bandung: PT Rosda Karya.
- Sumber Lain :
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-
indikator Pembangunan Ekonomi.*
<http://ecozone.html>. Di akses pada:
Senin,20 Februari 2018.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.